

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap *Internet Financial Reporting* Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Timur

¹Irna Amelia Moehardiono, ²Anik Yuliati

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Surabaya, Indonesia

e-mail: irnaameliaa@gmail.com, anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan opini audit terhadap *Internet Financial Reporting* pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur. Riset ini termasuk jenis riset kuantitatif dengan memakai data sekunder yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah di *website* resmi Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur selama periode 2015-2019. Populasi pada riset ini adalah 38 pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur. *Purposive sampling* dipakai untuk mengumpulkan data sampel dan didapatkan sampel sebanyak 23 kota/kabupaten. Riset ini memakai analisis regresi data panel yang dibantu *software Eviews 9* untuk menguji tiga hipotesis. Dari hasil uji secara simultan mengindikasikan jika pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan opini audit berpengaruh secara simultan atas *Internet Financial Reporting* pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa opini audit memengaruhi *Internet Financial Reporting* pemerintah daerah kota/kabupaten di Jawa Timur. Sedangkan pendapatan asli daerah dan ukuran pemda tidak mendorong pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur untuk menerbitkan laporan keuangan di internet.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, opini audit, *internet financial reporting*, transparansi

Abstract

This research aims to identify and examine the influence of local government revenue, size of local government, and audit opinion to local government Internet Financial Reporting. This research uses quantitative analysis techniques using secondary data retrieved from local government financial reports in official website of the regency/city in East Java Province 2015-2019. Population used in this research were 38 city / district governments in East Java Province. Purposive sampling was used to collect sample data and obtained a sample of 23 districts/cities. This research used panel data regression analysis with software Eviews 9 to test three hypotheses. The results showed that local revenue, size of local government, and audit opinion had a simultaneous effect on local government Internet Financial Reporting practices. The partial test results showed that audit opinion affected Internet Financial Reporting of the local government. Meanwhile, local government revenue and size of local government does not affected Internet Financial Reporting.

Keywords : local government revenue, size of local government, audit opinion, *internet financial reporting*, transparency

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi internet di kala ini telah menjadi kebutuhan yang berarti bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Akan tetapi, pemakaian teknologi internet pada lembaga publik maupun lembaga non publik di Indonesia kala ini masih bervariasi. Teknologi internet ialah wujud atas berkembangnya teknologi informasi serta komunikasi yang telah tumbuh dengan pesat serta telah memengaruhi sektor ekonomi yang ditunjukkan dengan sistem pertukaran informasi secara digital. Salah satu bentuk pertukaran informasi itu adalah penyampaian laporan keuangan suatu lembaga (atau yang disebut dengan *Internet Financial Reporting*) sehingga penyampaian informasi menjadi lebih efisien dan cepat untuk diakses.

Selama beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan yang merancang dan memanfaatkan situs perusahaan untuk mempublikasikan informasi keuangannya. Namun, sepertinya hal ini kurang mendapat perhatian dari lembaga pemerintahan di Indonesia. Verawaty (2015) dalam Lesmanawati (2019) mengemukakan adanya kesenjangan antara pemerintah daerah yang telah memanfaatkan *e-government* sebagai bentuk keterbukaan atas informasi keuangannya dengan banyaknya pemerintah daerah yang belum memanfaatkan teknologi internet secara optimal. Kurangnya perhatian mengenai pelaporan keuangan pada situs pemerintahan menyebabkan timbulnya *trust issues* oleh publik kepada pemerintah daerah.

Jika dilihat dari UU No. 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, wujud tanggung jawab pemda dalam mengatur keuangannya memanglah hanya sebatas melaporkan informasi keuangan pemda terhadap DPRD yang disesuaikan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Tetapi, dengan terbitnya UU No. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik memerintahkan kepada pejabat publik agar lebih terbuka, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi keuangan serta mengutamakan pelayanan publik, sudah sepantasnya pemerintah daerah mempublikasikan informasi

keuangannya kepada publik atas wujud dari tanggung jawabnya terhadap wewenang yang diberikan dan keterbukaan informasi pemerintah daerah. Bentuk transparansi informasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan menyediakan informasi yang mudah diakses penduduk dan para pengguna laporan keuangan lainnya. Transparansi tersebut diperlukan guna mencegah tindakan merugikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seperti manipulasi ataupun penyalahgunaan wewenang dalam penyajian informasi kepada publik.

Terkait dengan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah, Instruksi Mendagri No. 188/52/1797/SJ/2012 menginstruksikan kepada gubernur, walikota, serta bupati seluruh Indonesia agar mencantumkan menu di situs resmi pemerintah daerahnya masing-masing dengan judul “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)” berisikan dua belas dokumen pengelolaan anggaran. Dokumen pengelolaan anggaran yang dicantumkan pada instruksi tersebut yaitu: (a) Ringkasan RKA SKPD; (b) Ringkasan RKP PPKD; (c) Rancangan Peraturan Daerah APBD; (d) Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD; (e) Peraturan Daerah APBD; (f) Peraturan Daerah Perubahan APBD; (g) Ringkasan DPA SKPD; (h) Ringkasan DPA PPKD; (i) LRA SKPD; (j) LRA PPKD; (k) LKPD yang sudah diaudit; dan (l) Opini BPK mengenai LKPD.

Sekretaris Nasional FITRA (2020) mengeluarkan Survei Keterbukaan Anggaran (*Open Budget Survey*) yang menyatakan bahwa indeks keterbukaan anggaran Indonesia tahun 2019 mendapat skor 70 dari 100 poin, yang artinya mengalami kenaikan setelah survey dua tahun sebelumnya mendapat skor 64 (<https://seknasfitra.org>). Namun faktanya berdasar laporan *Corruption Perceptions Index* tahun 2020 Negara Indonesia justru menduduki peringkat 102 atas 180 negara yang diuji, yang mana hal ini menunjukkan penurunan sebesar 17 tingkat dari pengujian sebelumnya yaitu pada tahun 2019 dengan peringkat 85 dari 180 negara yang diuji (Transparency International, 2020). Kondisi ini menunjukkan masih dibutuhkannya upaya pemerintah daerah

yang lebih ekstra dalam meningkatkan kualitas transparansi informasi keuangannya guna meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas publik.

Di samping itu, data APJII 2020 menginformasikan jumlah pemakai internet yang tersebar di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2020 yakni sebanyak 26,3 juta orang. Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Tingginya tingkat pemakaian internet di Jawa Timur mengakibatkan tingginya pula tekanan masyarakat akan pengungkapan informasi keuangan melalui internet. Akan tetapi, menurut penjelasan

koordinators FITRA wilayah Jawa Timur, Ahmad Dahlan, walaupun publikasi laporan keuangan pemerintah daerah telah cukup lama diinstruksikan kepada beberapa pemerintah daerah di Jawa Timur, masih terdapat beberapa daerah yang belum mematuhi. Kenyataan tersebut didukung dengan terdapatnya sebagian daerah yang ditemukan belum mempublikasikan laporan keuangannya di situs tiap pemerintah daerah (www.kumparan.com).

Tabel 1. Ketersediaan menu TPAD di situs resmi pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur

No.	Pemda	Daerah Otonom	Perbaikan Website	Memiliki Menu TPAD	Tidak Memiliki Menu TPAD
1.	Kota	9	-	4	5
2.	Kabupaten	29	-	7	21
	Jumlah	38	-	11	26
	Persentase	100%	-	29%	68,4%

Sumber: data diolah penulis (2021)

Diketahui dari hasil observasi pada Tabel 1 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2021, sebesar 68,4% dari pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah melaksanakan transparansi dalam mengelola anggaran daerahnya seperti yang diinstruksikan dalam Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012. Namun, meskipun hampir semua situs pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur telah mencantumkan menu Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) untuk mengunduh dokumen keuangan dan kinerja pemerintah daerah, tetapi terkadang menu itu tidak ada isinya, dokumen yang dimuat tidak lengkap, dan tidak selalu mempublikasikan laporan keuangan setiap tahunnya.

Berpegang pada latar belakang dan permasalahan yang terjadi, riset ini dilakukan guna mengetahui dan menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), ukuran pemerintah daerah, dan opini audit terhadap penerapan *Internet Financial Reporting* di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur periode 2015-2019.

Teori keagenan menjadi teori yang melandasi penelitian ini. Pengertian teori keagenan yaitu bentuk interaksi diantara dua pihak ataupun lebih yang dalam hubungan itu terdapat pihak selaku agen dan pihak yang lainnya selaku prinsipal (Masra & Sari, 2020). Kedua pihak tersebut kemudian melakukan kesepakatan dimana agen menyerahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada prinsipal untuk kepentingan pengambilan keputusan (Putra & Syofyan, 2020). Teori keagenan ini juga dapat dilihat pada sistem pemerintahan Indonesia. Pada sistem pemerintahan daerah, masyarakat bertindak sebagai *prinsipal* yang melimpahkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah selaku agen untuk mengelola pemerintahannya. Lalu, pemerintah daerah selaku agen wajib menyampaikan hasil kinerjanya kepada publik dalam wujud laporan keuangan.

Signalling theory diartikan sebagai teori yang menerangkan tentang keharusan lembaga pemerintah untuk menyebarkan sinyal baik kepada masyarakat guna mengurangi asimetri

informasi. Yang dimaksud sinyal baik adalah adanya keterbukaan mengenai laporan keuangan yang bermutu, sistem pengendalian internal yang andal, dan pelaporan informasi yang lebih rinci sebagai bentuk pertanggungjawabannya masyarakat (Putra & Syofyan, 2020). Dengan begitu masyarakat akan kembali memberikan sinyal yang baik untuk mendukung kinerja pemerintah dalam membangun negara. *Internet Financial Reporting* metode yang tepat digunakan untuk mempertanggungjawabkan informasi keuangan pada publik dengan cara yang cukup efektif dan tidak memakan banyak biaya.

Penyajian informasi keuangan dengan perantara internet atau yang dinamakan *Internet Financial Reporting* (IFR) adalah cara perusahaan atau pemerintah untuk menyebarluaskan atau mempublikasikan informasi keuangannya kepada publik melalui internet (Sukmadilaga et al., 2019: 2). IFR termasuk kategori pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), bukan dikarenakan muatan pengungkapannya melainkan karena media penyampaiannya. Putra & Syofyan (2020) mendefinisikan IFR sebagai suatu kondisi ketika suatu pemerintahan menyediakan hal-hal berikut dalam *website* pemerintahan: (1) satu set laporan keuangan komprehensif (termasuk *footnote* beserta laporan auditor), (2) terdapat tautan ke laporan tahunan, dan (3) terdapat tautan ke badan keuangan pemerintah. Terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi praktik *Internet Financial Reporting* pemerintah daerah, di antaranya pendapatan asli daerah, ukuran daerah, dan opini audit.

Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai sumber-sumber pemasukan pemerintah daerah yang legal dalam memenuhi belanja pada suatu daerah (Azis & Hapsari, 2020). Pendapatan asli daerah juga dapat digunakan sebagai parameter yang mengukur performa pemda. Pemerintah daerah dengan jumlah PAD yang tinggi menandakan bahwa prestasi yang dicapai pada daerah tersebut sudah baik, dan sebaliknya. Pemerintah yang dapat mengelola keuangannya dengan baik akan menyampaikan

informasi keuangannya kepada publik dengan menggunakan teknik penyampaian yang lebih baik pula agar masyarakat selalu mendukung perkembangan kinerja pemerintah sehingga kegiatan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik. Pernyataan ini cocok dengan penelitian Saputra & Priyastivi (2019) dan Mawardi et al. (2019) yang mengungkapkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah, akan mendorong pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan pemda melalui internet.

H₁: Pendapatan asli daerah memengaruhi praktik *Internet Financial Reporting* pemda.

Selain pendapatan asli daerah, ukuran pemda juga diduga dapat memengaruhi *Internet Financial Reporting* pemda. Ukuran pemerintah daerah diartikan sebagai skala yang menggambarkan seberapa besar ataupun kecil suatu pemerintah daerah. Variabel yang dapat merepresentasikan ukuran pemerintahan adalah total aset. Aset dapat menggambarkan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah atas perolehan dari kejadian di masa lalu serta darimana manfaat ekonomi pada masa depan diharap untuk didapatkan. Pemda yang mempunyai ukuran/total aset yang lebih banyak cenderung lebih ketat saat mengelola dan menjaga asetnya. Dengan begitu ukuran atau total aset pemerintah daerah yang besar menyebabkan pemerintah daerah cenderung akan mempublikasikan informasi keuangan pemerintah daerahnya (Masra & Sari, 2020).

H₂: Ukuran pemerintah daerah memengaruhi praktik *Internet Financial Reporting* pemda.

Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Setelah memeriksa kewajaran informasi yang disediakan dalam laporan keuangan, auditor BPK mengeluarkan pernyataan atas hasil pemeriksaan yang dinamakan opini audit (Juniantika & Hapsari, 2020). Pemda dengan perolehan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) cenderung mengungkapkan laporan keuangannya melalui media internet guna membuktikan mutu atas pengelolaan laporan

keuangannya yang baik serta bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan opini audit di luar WTP akan memunculkan kesan buruk dari publik mengenai adanya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah, alhasil pemerintah cenderung tidak mengungkap laporan keuangannya. Pernyataan ini didukung oleh riset yang diteliti Khasanah et al. (2017) serta Pontoh et al. (2018) dengan hasil pemerintah daerah dengan opini WTP menunjukkan bahwa mereka mempunyai kemampuan yang lebih cakap dalam mengelola laporan keuangannya.

H₃: Opini audit memengaruhi praktik *Internet Financial Reporting* pemda.

METODE

Riset ini termasuk dalam riset kuantitatif. Data yang dipakai berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui proses studi pustaka, observasi, serta studi dokumentasi. Data riset ini diambil dari situs resmi masing-masing pemda di Jawa Timur dan dari laporan keuangan pemda yang diunduh dari situs www.bpk.go.id/. Penelitian mengambil populasi dari seluruh pemerintah kota/kabupaten se-Provinsi Jawa Timur periode 2015-2019. Total pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur ialah sejumlah 38 kota/kabupaten.

Dalam penentuan sampel, teknik *purposive sampling* dipakai pada riset ini atas ketentuan: (1) Kota/kabupaten di

Provinsi Jawa Timur 2015-2019. (2) Menyediakan situs resmi pemerintah kota dan kabupaten yang dalam kondisi aktif dan bisa diakses. (3) Situs pemerintah daerah menyediakan Laporan Realisasi APBD yang sudah diaudit oleh BPK RI periode anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan atau 2019. Dari kriteria tersebut diperoleh sampel sejumlah 23 kota/kabupaten dengan rincian 18 pemerintah kabupaten serta 5 pemerintah kota.

Riset ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif dan verifikatif. Analisis verifikatif yang dipakai pada riset ini ialah regresi data panel yang dibantu *software Eviews 9*. Model ini sesuai dengan objek penelitian yaitu kota/kabupaten yang berjumlah 23 kota/kabupaten dengan jangka waktu tiga tahun dari periode 2015-2019. Selanjutnya dilaksanakan tiga uji asumsi klasik antara lain (1) Uji normalitas, (2) Uji multikolinearitas, serta (3) Uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan perilaku dan distribusi data pada suatu sampel melalui pengukuran nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), serta standar deviasi.

Tabel 2. Analisis statistik deskriptif

Variabel	Observations	Max	Min	Mean	Standar Deviasi
Pendapatan asli daerah (X1)	115	0.6434	0.0139	0.1793	0.1118
Ukuran pemerintah daerah (X2)	115	31.4309	27.9705	28.9661	0.6580
Opini audit (X3)	115	1	0	0.8609	0.3476
<i>Internet Financial Reporting</i> (Y)	115	0.8696	0.0435	0.3504	0.1983

Berdasar uji statistic deskriptiif pada Tabel 2 diketahui bahwa:

1. Variabel pendapatan asli daerah mempunyai nilai *mean* sejumlah 0.1793 serta nilai standar deviasi sejumlah

0.1118. Artinya, data pendapatan asli daerah bukan merupakan data berkelompok atau tidak bervariasi dikarenakan standar deviasinya di bawah nilai rata-rata.

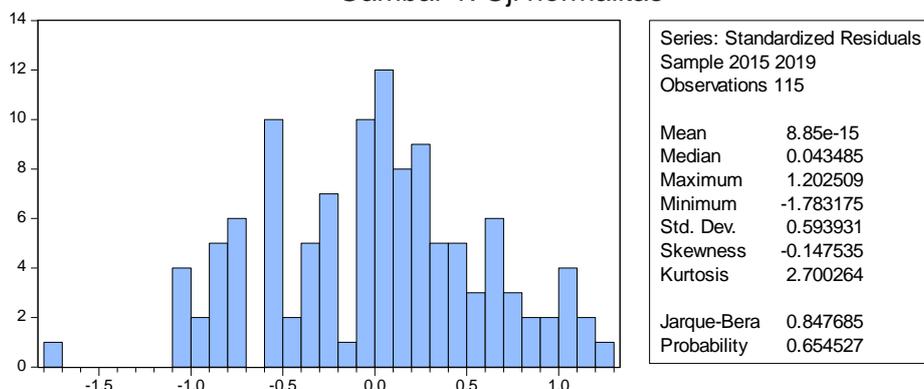
2. Variabel ukuran pemerintah daerah mempunyai nilai rata-rata sejumlah 28.9661 serta nilai standar deviasi sejumlah 0.6580. Hal tersebut berarti bahwa data ukuran pemerintah daerah bukan merupakan data berkelompok atau tidak bervariasi dikarenakan standar deviasinya di bawah nilai rata-rata.
3. Variabel opini audit mempunyai nilai rata-rata sejumlah 0.8609 serta nilai standar deviasi sejumlah 0.3476. Hal tersebut berarti bahwa data opini audit bukan merupakan data berkelompok atau tidak bervariasi dikarenakan standar deviasinya di bawah dari nilai rata-rata.
4. Variabel *Internet Financial Reporting* mempunyai nilai rata-rata sejumlah 0.3504 serta nilai standar deviasi sejumlah 0.1983. Hal tersebut berarti bahwa data *Internet Financial Reporting* bukan merupakan data berkelompok

atau tidak bervariasi dikarenakan standar deviasinya di bawah nilai rata-rata.

Setelah dilakukan uji statistik deskriptif, dilakukan pencarian model estimasi regresi yang tepat untuk data yang diteliti. Model regresi data panel yang paling cocok dipakai dalam riset ini berdasar *chow test*, *hausman test*, serta *lagrange multiplier test* adalah model *random effect*.

Setelah mengetahui model regresi yang cocok digunakan, barulah dilakukan uji asumsi klasik. Pada *random effect model*, uji asumsi klasik yang dipakai yaitu uji normalitas dan uji multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas tidak digunakan pada model *random effect*, karena model *random effect* yang memakai pendekatan *Generalized Least Squared (GLS)* ini justru berfungsi dalam menyembuhkan gejala heteroskedastisitas itu sendiri.

Gambar 1. Uji normalitas



Uji normalitas diukur menggunakan perbandingan antara nilai *Jarque-Bera (JB)* serta nilai *Chi Square* tabel. Apabila nilai *probability* di atas 0,05 artinya distribusinya normal. Berdasarkan uji normalitas dalam

riset ini nilai probabilitasnya adalah 0,654527 (di atas $\alpha = 0,05$) artinya data dalam riset sudah memiliki distribusi normal.

Tabel 3. Uji multikolinieritas

	PAD	SIZE	OP
PAD	1.000000	0.560058	0.259145
SIZE	0.560058	1.000000	0.238398
OP	0.259145	0.238398	1.000000

Multikolinieritas dapat diamati pada nilai korelasi antar variabel. Ciri tidak

adanya multikolinieritas adalah jika nilai korelasinya di bawah 0.8. Berdasarkan uji

multikolinieritas pada penelitian ini semua variabel tersebut tidak ada yang nilai korelasinya bernilai <0.8, artinya antar berkolerasi.

Tabel 4. Hasil uji signifikansi model *random effect*

Dependent Variable: IFR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/11/21 Time: 13:58
Sample: 2015 2019
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	0.130336	0.131553	0.990746	0.3240
SIZE	8.496655	4.350689	1.952945	0.0533
OP	0.407207	0.126755	3.212545	0.0017
C	-25.92160	14.47094	-1.791287	0.0760

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.445093	0.5690
Idiosyncratic random		0.387409	0.4310

Weighted Statistics			
R-squared	0.164702	Mean dependent var	1.227792
Adjusted R-squared	0.142127	S.D. dependent var	0.425237
S.E. of regression	0.393861	Sum squared resid	17.21902
F-statistic	7.295584	Durbin-Watson stat	1.412063
Prob(F-statistic)	0.000165		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.061110	Mean dependent var	3.384751
Sum squared resid	40.21401	Durbin-Watson stat	0.604624

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan *software Eviews 9* (2021)

Persamaan regresi data panel berdasar Tabel 4 di atas adalah:

$$IFR = -25.92160 + 0.130336 \text{ PAD} + 8.496655 \text{ SIZE} + 0.407207 \text{ OP} + e$$

Dari data tersebut dapat disimpulkan, *internet financial reporting* sebesar -25.92160 akan bertambah sebesar 0.130336 satuan apabila terjadi perubahan terhadap pendapatan asli daerah, akan bertambah sebesar 8.496655 satuan apabila terjadi

perubahan ukuran pemerintah daerah, dan akan bertambah sebesar 0.407207 satuan apabila terjadi perubahan terhadap opini audit.

Dalam Tabel 4, nilai $0.694366/\text{SIZE} + 0.044788 \text{ R-squared}$ sejumlah 0.142127, yang bila diukur dengan persentase yaitu sebesar 14,2127% maka dapat disimpulkan bahwa PAD, ukuran pemda, serta opini audit mampu menjelaskan *Internet Financial Reporting* sebesar 14,2127% dan sisanya 85,7873% disebabkan oleh variabel

penentu lainnya yang pada riset ini tidak digunakan.

Diketahui pada Tabel 4 nilai *prob* (*F-statistic*) adalah 0.00000 atau di bawah 5% yang menandakan bahwa variabel independen berupa nilai PAD, ukuran pemda, serta opini audit mempunyai pengaruh secara simultan atas praktik *Internet Financial Reporting* pada Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur periode 2015-2019.

Melalui Tabel 4 juga bisa diketahui hasil uji t di bawah ini.

- a. Nilai *probability* pendapatan asli daerah sejumlah 0.3240 (di atas $\alpha = 0.05$) dengan nilai koefisien regresi positif, artinya pendapatan asli daerah tidak memengaruhi praktik *Internet Financial Reporting* secara parsial di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur periode 2015-2019.
- b. Nilai *prob* ukuran pemerintah daerah sebesar 0.0533 (di atas $\alpha = 0.05$) dengan nilai koefisien regresi positif, artinya ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh secara parsial atas praktik IFR di Kota/Kabupaten Provinsi Jatim periode 2015-2019.
- c. Nilai *prob* opini audit sejumlah 0.0017 (kurang dari $\alpha = 0.05$) dengan koefisien regresi positif yang artinya opini audit berpengaruh signifikan positif pada praktik IFR di Kota/Kabupaten Provinsi Jatim tahun 2015-2019.

Pembahasan

Pengaruh PAD terhadap Praktik *Internet Financial Reporting*

Hasil regresi yang ditunjukkan di Tabel 4 menunjukkan nilai *probability* sejumlah 0.3240 (di atas $\alpha = 0.05$) yang artinya pendapatan asli daerah tidak memengaruhi secara parsial praktik IFR Pemerintah Kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015-2019. Hal ini berlawanan dengan hipotesis yang dibuat yang mana pendapatan asli daerah memiliki pengaruh pada praktik *Internet Financial Reporting*.

Pemda dengan PAD yang besar tidak memengaruhinya dalam mengungkapkan informasi keuangannya melalui situs pemerintah daerah. Padahal,

pemda yang punya pendapatan asli daerah tinggi menandakan punya kinerja yang baik sehingga dapat memberikan citra baik jika melaporkannya kepada masyarakat. Hasil penelitian ini disokong oleh penelitian Nosihana & Yaya (2016) dan Juniantika & Hapsari (2020) yang menghasilkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh atas praktik *Internet Financial Reporting* pemda. Pendapatan asli daerah yang tinggi tidak akan berpengaruh penyajian laporan keuangan. Besarnya pendapatan asli daerah tidak berdampak secara langsung bagi masyarakat, dimana masyarakat membutuhkan informasi keuangan yang diungkapkan oleh pemda dalam *e-government* (Nosihana & Yaya, 2016).

Pengaruh Ukuran Pemda terhadap Praktik *Internet Financial Reporting*

Hasil pengujian pada Tabel 4 nilai *prob* 0.0533 di atas $\alpha = 0.05$ yang berarti ukuran pemerintah daerah tidak memengaruhi praktik *Internet Financial Reporting* secara parsial di Kota/Kabupaten Provinsi Jatim selama tahun 2015-2019. Hal ini berlawanan dengan hipotesis yang dibuat yang mana ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh pada praktik *Internet Financial Reporting*.

Hasil dari uji hipotesis tersebut mengindikasikan jika ukuran pemda tidak memengaruhi praktik *Internet Financial Reporting* di Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jatim. Pernyataan ini disebabkan karena masih banyaknya pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur yang masih memiliki total aset yang kurang. Hal ini menyebabkan masih banyak pemda yang belum mempublikasikan laporan keuangannya pada internet. Pemda dengan LKPD yang buruk akan memunculkan kecurigaan bagi publik.

Penelitian yang menyokong hasil ini adalah penelitian Wijaya et al. (2020) dan Muthiha (2017), yang menemukan bahwa ukuran pemda tidak memengaruhi praktik *Internet Financial Reporting* pemda.

Pengaruh Opini Audit terhadap Praktik *Internet Financial Reporting*

Dari hasil regresi Tabel 4, menunjukkan nilai *prob* sebesar 0.0017 (nilai *prob* di atas dari $\alpha = 0.05$), artinya opini audit memengaruhi praktik IFR Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jatim selama tahun 2015-2019. Koefisien regresi ukuran pemerintah sebesar 0.407207 artinya memiliki arah positif terhadap praktik *Internet Financial Reporting* yaitu ketika opini audit mendapat nilai yang baik maka praktik *Internet Financial Reporting* akan meningkat. Hal tersebut cocok dengan hipotesis yang disusun, yaitu opini audit berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting*.

Pemberian opini wajar tanpa pengecualian menunjukkan bahwa pemda yang bersangkutan telah melaporkan laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan baik. Pada umumnya, pemberian opini wajar tanpa pengecualian ini diharapkan oleh setiap pemda, maka dari itu opini audit wajar tanpa pengecualian bisa memengaruhi pemda untuk melaporkan laporan keuangannya melalui internet.

Jika dikaitkan dengan teori sinyal, pemerintah daerah dengan opini audit yang baik menandakan bahwa mereka telah mengirimkan sinyal yang baik kepada publik sehingga membuat pemda mempublikasikan laporan keuangannya dengan media internet. Teori ini sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh Juniantika & Hapsari (2020) dan Pontoh et al. (2018) yang menemukan bahwa pemda yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian mengindikasikan tingginya kinerja saat mengelola laporan keuangan dengan baik. Dengan begitu dapat mendorong pemda untuk mempraktikkan *Internet Financial Reporting* di *website* resminya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Riset ini dilaksanakan guna mengetahui dan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran

pemerintah daerah, serta opini audit terhadap *Internet Financial Reporting* pemkab/pemkot di Provinsi Jawa Timur selama 2015-2019. Berdasarkan pengujian secara simultan bahwa pendapatan asli daerah, ukuran pemda, serta opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik IFR Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur periode 2015-2019 dengan koefisien determinasi sebesar 14,21%. Berdasarkan uji parsial diketahui bahwa pendapatan asli daerah serta ukuran pemda tidak mempunyai pengaruh terhadap praktik IFR di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur selama 2015-2019. Sedangkan opini audit daerah berpengaruh secara positif terhadap praktik IFR di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur selama 2015-2019.

Saran

Berdasarkan hasil riset ini, peneliti memberi saran bagi peneliti selanjutnya agar menambah jumlah variabel yang diduga juga memengaruhi praktik *Internet Financial Reporting* seperti kompetisi politik, tingkat hutang, kondisi keuangan, dan variabel-variabel lainnya yang dianggap bisa memengaruhi *Internet Financial Reporting* pemerintah daerah. Kedua, penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbesar banyak sampel, yang imana pada riset ini jumlah sampel mengalami keterbatasan, yaitu hanya sebatas pemda di Jawa Timur. Hal ini menyebabkan hasil penelitian ini tidak bisa diterapkan secara general untuk semua pemerintah daerah di Indonesia. Ketiga, penelitian berikutnya diharapkan untuk menggunakan periode yang lebih lama, lebih dari tiga tahun, sehingga dapat menunjukkan pelaporan laporan keuangan pemda di internet secara lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

Azis, I., & Hapsari, D. W. 2020. Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah terhadap internet financial reporting. *e-Proceeding of Management*, 7(2): 3263–3268. Diakses dari <https://openlibrarypublications.telkom>

- university.ac.id/index.php/management/article/view/13394
- Juniantika, D. A., & Hapsari, D. W. 2020. What motivates internet financial reporting in the public sector? Case of a local government in Indonesia. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 3(2): 102–116.
<https://doi.org/10.24815/jaroe.v3i2.17235>
- Kementerian Dalam Negeri. 2012. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah*.
- Khasanah, I. N., Yuhertiana, I., & Budi, G. S. 2017. Determinan aksesibilitas internet financial reporting (ifr) pemerintah ibu kota provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, 1–20. Diakses dari <https://akuntansia.com/jurnal-akuntansi-sna/sna-20/>
- Lesmanawati, D. 2019. Pengaruh local government wealth , intergovernmental revenue dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di indonesia secara online. *InFestasi: Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 15(2): 109–116.
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v15i2.6005>
- Masra, E. A., & Sari, V. F. 2020. Faktor yang mempengaruhi internet financial reporting (ifr) pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2): 2757–2771.
<https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.246>
- Mawardi, M. C., Diana, N., & Firly, A. 2019. Pengaruh kinerja dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemerintah daerah. *E-JRA*, 08(7): 53–63. Diakses dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4230>
- Mutiha, A. H. 2017. Faktor penentu aksesibilitas internet financial reporting pada e-government pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat. *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, 550–560. Diakses dari <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8563>
- Nosihana, A., & Yaya, R. 2016. Internet financial reporting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2): 89–104.
<https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389>
- Pontoh, G. T., Rura, Y., Rahman, A., & Ibrahim, M. A. 2018. Internet financial reporting of public institutions and e-government as a medium of good governance in Indonesia. *GATR Journals*, 3(3): 28–33. Diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3273900
- Putra, A. A. A., & Syofyan, E. 2020. Pengaruh ukuran pemerintah, pendapatan per kapita dan leverage terhadap keteraksesan internet financial report oleh pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1): 2020–2034.
<https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.193>
- Saputra, N., & Priyastiwi. 2019. Pengaruh kinerja keuangan dan karakteristik daerah terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(2): 157–172.
<https://doi.org/10.32477/jrm.v6i2.21>
- Seknas FITRA. 2020. *Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN*. Diakses dari <https://seknasfitra.org/open-budget-survey-2019-raih-skor-70-indonesia-ranking-18-dunia-dan-ranking-2-asean/>
- Sukmadilaga, C., Sudrajat, Maha Putra, D., Khasanah, U., Sasti Ferina, I., Sagara, Y., & Michael Musaffi, A. 2019. *Internet financial reporting: Laporan keuangan berbasis teknologi*. Bandar Lampung: AURA.
- Transparency International. 2020. *Corruption Perceptions Index 2020*. Diakses dari

<https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>

WartaBromo. 2019. *Potret Buram Transparansi Anggaran*. Diakses dari <https://kumparan.com/wartabromo/potret-buram-transparansi-anggaran-1550888462358793858>

Wijaya, H., Zaitul, & Rahmawati, N. 2020. Intenet dinancial reporting dan faktor-faktor yang mepengaruhinya pada pemerintah kota dan kabupaten di Sumatera Tengah. *Abstract of Undergraduate Research*, 17(1): . <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389>